

Judul : Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Juga Sistem Pengawasan Peredaran Obat
Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kasus Gagal Ginjal Akut

Usut Juga Sistem Pengawasan Peredaran Obat

SENAYAN mendukung langkah kepolisian menetapkan tersangka perusahaan farmasi dalam kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA). Sebab, pengusutan kasus tersebut harus dituntaskan.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasehyani Aher mendesak, kasus GgGAPA ini jangan berhenti sampai penetapan tersangka saja. Pengusutan harus dilakukan sampai pada bagaimana sistem pengawasan terhadap peredaran obat selama ini.

"Apalagi, diduga penyebab GgGAPA adalah bahan baku

obat yang tercemar," ujarnya. Netty mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pengawasan obat yang beredar.

"Apakah pengawasannya belum maksimal karena keterbatasan wewenang, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kelalaian prosedur atau ada kendala apa?" tanya Politikus PKS ini.

BPOM, lanjutnya, mesti memberi penjelasan terkait dengan pengawasan pre-market maupun post-market obat yang diproduksi di dalam negeri maupun impor dari luar negeri.

Terlebih, perusahaan farmasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga tidak melakukan pengecekan atas profilin glikol (PG) yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Menurut info yang diterimanya, bahan PG yang menghasilkan cemaran penyebab gagal ginjal akut, banyak diimpor dari China, India, dan Vietnam.

"Nah, apakah selama ini tidak ada pengecekan dan pengawasan terhadap bahan PG impor tersebut sebelum dan sesudahnya?" tanya dia.

Oleh karena itu, Netty men-

dukung sepenuhnya pengusutan kasus GgGAPA sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. Pihak yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi hukum karena melakukan kelalaian yang menyebabkan ratusan anak Indonesia meninggal dunia.

Dia meminta Pemerintah agar kasus GgGAPA jangan disederhanakan hanya dengan mengejar cemaran EG dan DEG yang terkandung dalam bahan pelarut atau pembuat obat. Kasus ini harus menjadi momentum dalam melakukan evaluasi menyeluruh pada tata kelola obat di negara ini.

"Pastikan negara hadir melakukan pengawasan peredaran obat secara bertanggung jawab, dari hulu sampai hilir. Kalau ini dilakukan, tentunya kita tidak panik setiap ada kejadian luar biasa," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut secara transparan karena telah banyak merugikan masyarakat Indonesia.

"Dalam kasus yang sifatnya nasional ini, penyelidikan yang menuju pada proses projustitia harus dilakukan secara transparan," ujarnya.

Arsul berharap, Bareskrim Polri membuktikan penegakan hukum kasus ini dilakukan secara adil dan transparan. Hal tersebut bisa memenuhi ekspektasi publik mengenai penegakan hukum di Tanah Air yang berkeadilan.

"Jika ini yang menjadi pilihan, publik akan menilai bahwa penegakan hukum kita itu serius dan berkeadilan. Bukan sekadar karena tidak enak terhadap publik sehingga perlu ada yang diproses hukum," ujar politikus PPP ini.

Wakil Ketua MPR ini meminta Bareskrim Polri tidak tebang

pilih dengan hanya mentersangkan pihak tertentu. Tindakan seluruh pihak, termasuk pejabat di jajaran Pemerintahan yang terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut, yakni PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical.

Dua perusahaan tersebut diduga memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khusus, kemanfaatan dan mutu. ■ TF